

8
Tinggal Kampung
Pembangunan ekonomi; Kesejahteraan Rakyat;
Kemiskinan

PEMBANGUNAN DAN KETERBELAKANGAN (Suatu Studi Kemiskinan Tentang Implikasi Kebi- jaksanaan Pembangunan Dan Strategi Survival Kaum Miskin Dalam Mengatasi Kemiski- nannya Di Wilayah *Hinterland* Kotamadya Batam)

*Development and Underdevelopment (A Study on Poverty
About The Implication of Development Policies and The
Survival Strategy of The Poor in Alleviating Poverty
in Hinterland of Batam Municipality).*

Syamsul Bahrum¹, Sunyoto Usman², dan Rahardjo³.

*Program Studi Sosiologi
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

As a strategic area designed for a centre of growth in the region, Batam Municipality (mainly Batam Island as a core region) has been planned to be a modern "Island City" which has specific functions as an industrial zone, trade centre, tourist destination, logistics warehouse and the transshipment base. To achieve those goals, the Central Government has determined various development policies.

The politics of regional development of Batam tends to be criticized due to its "urban bias", creates no unleast less benefit to "the local people", adopted the big push strategy and has pushed economic growth with less developmental distribution effect, hypher (Pseudo) urbanization, rural breakdown and depopulation.

The idea of Batam as an engine of growth for its surroundings (*hinterland*) is still far from the reality of development. The concentration of development in urban area and modern sector induced by MNCs (Multi National Cooperations) has neglected the majority of the rural poors who are living in the underdeveloped area. The tendencies of regional economic policies in macroscopic (regional) approach and quantitative data justification has strengthened the vicioes circles of poverty underdevelopment and inequalities in the rural area (fishermen subsistence economy). Although many of the rural poors has less access to the developmental opportunity,

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kotamadya Batam.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah, Yogyakarta

but they have their own survival strategies in alleviating the poverty phenomena. The survival strategies are (vertically or horizontally) social and interpersonal networks relationships, off-farms jobs (efforts diversification), urbanization and migration, adoption and adaptation of the culture of poverty.

Keywords: *urban bias – growth pole – engine of growth – rural breakdown and depopulation – hypher-urbanization*

PENGANTAR

Substansi fenomena kemiskinan di wilayah *hinterland* Kotamadya Batam tidak terlepas dari dinamika pembangunan yang cepat di Pulau Batam terutama semenjak ditetapkannya Pulau Batam dan beberapa pulau lainnya sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*). Kedengarannya agak ironis bahwa setelah hampir seperempat abad upaya membangun Pulau Batam telah dilakukan dengan hampir US\$. 4.119.423.431 investasi swasta (83,84%) dan US\$. 794.126.102 investasi Pemerintah (16,16%) sampai tahun 1994, dan selama Pelita V untuk wilayah *hinterland* telah dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp 15. 697.308.207,- (44,16%) dari dana pembangunan Kotamadya Batam yang bersumber dari APBN, APBD TK. I, Inpres Dati II, Inpres Kesehatan, Inpres SD, INGUB, PKT, (tidak termasuk IPJK), padahal wilayah *hinterland* hanya dihuni oleh 14% penduduk (45.715 jiwa) mengapa perangkap keterbelakangan, jerat kemiskinan dan jurang kesenjangan pembangunan antar wilayah, penduduk dan sektor belum dapat diatasi?

Dalam suatu kasus spesifik, bahkan dalam strata sosial di Kotamadya Batam sendiri masih menyisakan sekelompok masyarakat tradisional (Suku Laut) yang hidup tidak hanya dalam kondisi serba miskin tetapi hampir "masih satu abad" tertinggal dalam banyak hal kecuali teknik menangkap ikan dan taktik hidup di laut. Meskipun aktivitas pembangunan telah memacu berbagai perubahan, akan tetapi lebih terlokus di Pulau Batam.

Masyarakat di *hinterland* masih berada pada posisi marginal dari *main stream* pembangunan di Kotamadya Batam. Kebijakan pembangunan spasial dan sektoral lebih terfokus dan berlokasi di Pulau Batam, pada beberapa kasus mematikan berbagai sektor ekonomi tradisional (*subsistence*) di pedesaan, dan semakin lesunya aktivitas pembangunan di wilayah *hinterland* (pedesaan nelayan) dan di Belakang Padang. Beberapa indikator sosial ekonomi yang menandakan lesunya perkembangan pamban-

gunaan di wilayah *hinterland* tercatat dari realitas seperti:

1. rendahnya angka pertumbuhan penduduk akibat faktor migrasi,
2. rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di *hinterland*,
3. terbatasnya akses pembangunan yang menyentuh langsung penduduk lapisan bawah di pedesaan,
4. kurangnya diversifikasi usaha, dan langkanya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta (perusahaan besar),
5. banyaknya pengangguran yang terselubung dan setengah pengangguran terutama di kalangan angkatan kerja muda,
6. belum banyaknya angkatan derajat kehidupan masyarakat tradisional (Suku Laut) kecuali yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kodya Batam dan KKS Kodya Batam.

Secara skematik, permasalahan pembangunan di Kotamadya Batam dapat diklasifikasikan sebagai permasalahan pokok dan permasalahan spesifik, sedangkan kedua permasalahan tersebut dapat ditinjau dari aspek geografis maupun demografis.

Phenomena kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di *hinterland* Batam tidak terlepas pula dari politik ekonomi regional dan cara pandang "orang luar" terhadap fenomena itu sendiri. Chambers (1983: 2) menggunakan konsep prasangka proyek, prasangka kelompok sasaran, prasangka musim, prasangka alasan diplomasi, dan prasangka profesional, sedangkan More (1980: 59) menggunakan konsep kemiskinan terselubung (*disguised poverty*) untuk menjelaskan bias negatif pembangunan. Michael Lipton (1980: 3) menggunakan konsep *urban bias* untuk menjelaskan mislokasi pembangunan, sedangkan Balogh (1974: 75) mengasumsikan lemahnya distribusi investasi secara geografis antara wilayah utama pembangunan (*spread head development area*) dengan wilayah sekitarnya, yang seharusnya berfungsi sebagai *spreading employment area*.

Namun pendapat ini dibantah oleh Boudeville (1964: 106) dan Fishlow (1980: 173) yang menyatakan *growth pole strategy of development* akan menciptakan efek penyebaran pada wilayah sekitarnya. Kombinasi *development with economic development* dan *economic development with economic growth* yang merupakan esensi dari strategi pertumbuhan dipertanyakan pula oleh Seers (1963). Pada posisi yang berbeda, Korten (1984) mempermasalahkan konsep *organizational model*, di mana posisi aparat birokrasi (kaum elit teknokratis) dalam memformulasikan dan mengimplementasikan pembangunan kurang responsif dan akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat dan pembangunan terlalu sentralistis dengan target-target kuantitatif. Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, Kats (1965: 16) menempatkan pentingnya intervensi Pemerintah untuk mengatur relokasi dan redistribusi pembangunan agar tercipta pemerataan

akses. Rondinelli (1965: 31) mengasumsikan adanya *differences in access to productive activities and social services* untuk menjelaskan problema utama pembangunan di negara berkembang. Hal ini searah dengan kritik Hagul (1992: vii) tentang adanya salah arah dalam program pembangunan, proyek untuk orang miskin ternyata banyak yang dimanfaatkan oleh mereka yang status sosial ekonominya lebih mapan di pedesaan.

Selanjutnya Mahbub Ul Haq (1976) mempermasalahakan arogansi aparat perencana pembangunan dengan sepuluh dosanya, dengan mempertanyakan apakah *development around the people or the people around the development*. Tidak heran apabila Leftwich (1984: 295) menggunakan konsep *monopsonistic market mechanism* (harga dikontrol pembeli kaya) untuk menjelaskan lemahnya *bargaining position* orang miskin di pedesaan di dalam memasarkan produksinya. Permasalahan lain di *hinterland* Batam tidak hanya pada proses penjualan produksi, tetapi juga pada pengadaan faktor produksi dan konsumsi karena mereka terperangkap menjual produk lebih murah dan selalu membeli barang yang sama dihargai lebih mahal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Caplovitz (1963) menyatakan *the poor also pay more for what they buy*. Membahas lebih konsepsional teoretis problema kemiskinan di Kodya Batam paralel pula dengan studi kemiskinan yang dilakukan oleh banyak pakar dengan berbagai pendekatan multi-disipliner. Amaluddin (1987) mengkaji kemiskinan dengan polarisasi sosial, Sayogyo dkk. (1964) mengaitkan kemiskinan dalam konteks pembangunan, Mubiyarto dkk. (1984, 1988) melakukan studi antropologis fenomena kemiskinan di desa pantai begitu pula Nazwar (1990), dan Lutfhi dkk. (1985) tentang kehidupan masyarakat perairan.

Studi kemiskinan dalam konstalasi pembangunan regional dengan spesifikasi terletak di wilayah perbatasan, berada di pusat pertumbuhan dalam suatu status Pemerintah Kotamadya yang berpulau-pulau (*archipelagouistic*) belum pernah dilakukan apalagi mengaitkan antara kemajuan di suatu wilayah Pulau Batam sebagai *core region* dan keterbelakangan di wilayah lain seperti perkampungan nelayan di sekitarnya (*peripheries*) atau dalam satu tatanan wilayah administrasi pemerintahan (Kodya Batam).

Studi tentang kemiskinan ini berusaha menjawab atas pertanyaan: Mengapakah kaum miskin masih tetap bertahan dan *survive* meskipun berbagai paket pembangunan masih belum menyentuh mereka? Bagaimana mereka mensiasati hidup atas fenomena akses yang kelihatannya menjauhi mereka? Lalu alternatif strategi survival apa yang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan yang membelenggu dan sejauh manakah efektifitas hasil intervensi external dan titik temu antara paket yang diprogramkan untuk mereka dengan ritme kehidupan kaum miskin sehari-hari? Mereka miskin disebabkan oleh faktor mana yang dominan? Apakah fak-

tor struktural, kultural, dan natural? Menganalisis fenomena kemiskinan di lingkungan kaum nelayan sangat penting karena kaum nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mudah rentan terhadap segala perubahan dan nelayan merupakan kelompok masyarakat termiskin dari golongan penduduk yang mempunyai mata pencaharian lain di Indonesia (Emerson, 1977: 13), dan dibandingkan dengan kelompok petani, kelompok nelayan di Indonesia merupakan kelompok yang sangat tertinggal. Pada umumnya penduduk miskin itu berasal dari golongan petani berlahan sempit, buruh tani, nelayan, dan pengrajin (Sayogyo, 1978, 1991).

Dibandingkan antara desa lahan kering dengan desa pantai (dengan mata pencaharian pokok sebagai nelayan), maka masalah kemiskinan lebih nyata di daerah nelayan. Musim, misalnya, dapat dengan tiba-tiba menghentikan usaha penangkapan ikan mereka di laut, hal ini juga berlaku pada cuaca yang mudah berubah (Firth, 1966: 5). Kondisi kemiskinan kelompok nelayan terefleksi dari adanya keterbatasan penguasaan modal perikanan (perahu dan alat tangkap), keterbatasan modal di luar usaha perikanan (uang dan jasa). Keadaan perumahan dan permukiman yang kurang memadai dan pendidikan serta keterampilan di luar bidang perikanan yang rendah, menyebabkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok juga rendah. Kemiskinan pada dasarnya merupakan suatu keadaan serba kurang dan belum mampu mencukupi kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan pokok manusia bermacam-macam, berbeda antar satu daerah dan komunitas dengan daerah lainnya, sehingga definisi kemiskinan sulit diterima secara universal. Oleh karena itu konsep kemiskinan memuat makna multi kompleks, di samping ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, juga adanya kebutuhan yang menyangkut fungsi sosial. Friedman (1979) memasukkan konsep terbatasnya kesempatan kerja untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial atau modal produktif. Baldwin (1960) memasukkan konsep produksi barang primer, tekanan penduduk yang tinggi, sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pendapatan masyarakat yang rendah sebagai akibat faktor produktif yang terbatas. White dan Sinaga (1978) mengasumsikan gejala kemiskinan pada masyarakat sebagai gejala struktural atau alami atau sekaligus struktural dan alami.

Bagi masyarakat nelayan fenomena dan problema utama pembangunan adalah masalah kehidupan sehari-hari yang wujud dalam dunia kenyataan seperti kelaparan, penyakit dan meninggal dalam usia muda, kebutuhan akan pekerjaan dan perumahan, dan merasakan kehilangan nilai-nilai yang biasanya memberi makna kepada kehidupan (Berger, 1976: 9). Mereka tidak hanya miskin secara ekonomi (miskin sumber daya

produktif), tetapi juga sosial (lemahnya jaringan sosial) dan politik (kekurangan akses dan saluran tindak pada kekuasaan) (Effendi 1993: 201-204).

Secara teoretis fenomena kemiskinan dianalisis pula oleh Malassis (1975: 93) yang mengembangkan teori tentang siklus kemiskinan (*The Vicious Circles of Poverty*), Johari (1989: 51) mengajukan suatu tesis tentang *Locational Dimension of Poverty* dengan kata-kata kunci *territorial confinement to life*. Edgren dan Mugtada (1987:8) mengaitkan lemahnya akses pada pekerjaan dengan kemiskinan, *poverty levels are often attributed to lack of employment opportunity*, menyarankan perlunya intervensi Pemerintah berupa realokasi sumber produktif untuk mereduksi kemiskinan. Effendi (1986: 6) memasukkan pentingnya posisi birokrasi pemerintahan dalam mempengaruhi akses pada pelayanan publik.

CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus (*case study*) dan empirik dengan *sampling areas* di empat desa, dengan seratus rumah tangga sebagai *sampling households*, dengan pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Studi sosiologis ini berusaha memotret secara holistik profil dan fenomena kemiskinan *hinterland* di pusat pertumbuhan di Batam (*poverty admists plenty*). Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap, pertama melakukan studi pustaka dan *library research*, kedua melakukan studi penjajakan (*preliminary observation*) melalui *reconnaissance survey*, dan ketiga melakukan penelitian utama (*field research*). Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan beberapa cara yakni pertama teknik observasi dengan proses pengamatan biasa dan pengamatan langsung (*participant observation*), kedua teknik kuesioner, dan ketiga dengan melakukan wawancara bebas (*free interview*) dan terstruktur (*focused interview*).

Data dan fakta yang telah dikumpulkan melalui *non random sampling* dianalisis dengan mempergunakan teknik analisis data dengan metode *acclectic* yang menggabungkan metode penelitian *grounded* yang bersifat kualitatif (nonuji statistik) dengan metode penelitian survei dan analisis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data kualitatif yang bersifat kontekstual naratif dikombinasikan dengan data kuantitatif yang bersifat tekstual numerik. Analisis dicapai melalui reduksi, presentasi dan konklusi atau interpretasi data dan informasi. Di samping itu, data dan fakta sosiologis yang diperoleh secara numeratif dan numerik dilakukan interpretasi dengan metode *verstehen* (*interpretative understanding*) agar pemahaman data dan informasi tidak hanya di permukaan akan tetapi masuk ke aspek substansial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Wilayah Penelitian

Pembangunan di Kotamadya Batam tidak terlepas dari sandaran posisi geostrategis yang menempatkan wilayah ini sebagai *crossing point* dari jalur lalu lintas teramai dengan kedudukan Singapura sebagai *global finance networks centre*. Pengembangan Batam tidak terlepas dari kerjasama regional (bilateral, trilateral, dan multilateral) dengan mengandalkan posisi kedekatan (*proximity*) yang bersifat *comparative advantage* terutama antara Singapura Johor Riau (SIJORI) sebagai suatu *one investment region* yang kemudian diperluas menjadi IMS-GT (*Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle*).

Kemajuan ekonomi telah mendorong pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yang lima tahun terakhir (1990-1995) hampir mencapai 12,8% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ternyata belum mampu diantisipasi oleh berbagai pihak terutama dalam penyediaan utilitas publik atau fasilitas sosial. Tiada titik temu antara suplai rumah (yang banyak dibangun rumah mewah oleh developer) dengan kebutuhan real penduduk (migran yang datang relatif bekerja dengan pendapatan rendah karena hampir 80% tamatan SLTA (Gambar: 5) menyebabkan berkembangnya lokasi dan jumlah permukiman liar (Gambar: 6). Secara konsepsional berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permukiman liar.

Pesatnya pembangunan yang terjadi di Batam hampir meninggalkan percepatan daya guna dan hasil guna pembinaan birokrasi pemerintahan wilayah. Mengantisipasi pembangunan di masa mendatang dirasakan perlu untuk melakukan penataan wilayah dari tiga menjadi dua belas kecamatan. Sebagai pusat pengembangan utama, maka laju pertumbuhan ekonomi sangat didominasi oleh sektor swasta yang menginvestasi hampir 83,84% dana total dana pembangunan. Namun hanya terkonsentrasi di Pulau Batam sebagai *centre of development* dan hanya satu persen yang disisakan untuk wilayah *hinterland*, sedangkan penduduk di *hinterland* mencapai 14%.

Ternyata ketimpangan regional dalam pembangunan belum mampu dilitimasi dengan bantuan langsung melalui dana Pemerintah mengingat terdapatnya perlakuan administratif yang bersifat diskriminatif antara penduduk yang bermukim dan aktivitas ekonominya yang ada di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) dengan Luar Kawasan Berikat (*Non-Bonded Zone*). Perlakuan dirasakan pada kesempatan berpeluang ke luar negeri (membayar fiskal bagi penduduk *non bonded zone*) yang bermukim di Kecamatan Belakang Padang. Perlakuan diskriminatif juga terjadi pada pemasuk-

an sembilan bahan pokok bagi konsumsi penduduk lokal di luar Kawasan Berikat sehingga kalaupun sampai ke tangan masyarakat biasanya lebih mahal karena melalui berbagai prosedur yang berbelit dan dipersulit dengan proses yang melibatkan mata rantai yang panjang.

2. Profil Rumah Tangga Perikanan Nelayan Miskin

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga nelayan miskin ditandai dengan pendapatan rumah tangga yang sangat rendah. Rata-rata pendapatan perkapitan per bulan penduduk termiskin adalah Rp. 18.000,00, dengan pendapatan terendah adalah Rp. 17.500,00, sedangkan dalam katagorisasi Badan Pusat Statistik (BPS: 1992) untuk wilayah pedesaan di Kotamadya Batam batas toleransi untuk dapat dikatagorikan miskin adalah Rp. 19.973,00, sedangkan pembagian jenis pengeluaran dari pendapatan yang diperoleh perbulannya menurut persentase sebahagian besar (51%) dipergunakan untuk konsumsi. Kondisi alat tangkap sebagian besar dalam kondisi rusak atau alat lama yang jelas akan mempengaruhi produktivitas penangkapan ikan, sedangkan di sisi lain status pemilikan alat tangkap yang baru biasanya diperoleh dari menyewa, meminjam, atau milik sendiri yang sebelumnya diperoleh melalui pembelian kredit dari *tauke* dengan pengembalian penyeteroran per hari atau setiap kali menangkap ikan. Bagi nelayan miskin, kondisi kesehatan merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kesediaan mereka turun ke laut menangkap ikan di samping kondisi alat tangkap, musim, sikap mental, dan perolehan hasil sebelumnya. Hari kerja efektif mereka dalam sebulan rata-rata antara 7 dan 20 hari, dengan produksi rata-rata 8 - 60 kg per bulan yang apabila dipasarkan dihargai antara Rp. 18.200,00 dan Rp. 132.000,00.

Ditinjau menurut aspek sosial budaya, tingkat pendidikan rumah tangga nelayan miskin sangat memperhatikan, baik kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, maupun anak-anaknya. Rata-rata mereka tidak pernah sekolah, kalaupun sekolah biasanya tidak tamat sekolah dasar. Lemahnya akses keluarga miskin atas pendidikan berkaitan pula dengan penyediaan infrastruktur pendidikan mengingat kondisi wilayah yang berpulau-pulau sehingga mempersulit upaya penciptaan aksesabilitas yang lebih efektif. Tidak hanya di bidang pendidikan rumah tangga miskin tertinggal dari masyarakat lainnya, tingkat kesehatan dan sanitasi lingkungan dan penyediaan perumahan yang layak huri juga jauh dari kenyataan. Problema kesehatan, rumah sehat, tingkat kemiskinan dan pendapatan, serta pendidikan merupakan problema yang saling berkait.

3. Kemiskinan dan Alternatif Strategi Survival.

Beberapa strategi survival yang dijadikan alternatif rumah tangga miskin untuk mengatasi kemiskinannya adalah sebagai berikut.

- a. Membentuk jaringan sosial (*social networks*) dan hubungan antar pribadi (*interpersonal relationships*) misalnya melalui *patron-client relationships*. Terdapat dua pola yang dibentuk nelayan yakni pertama membentuk jaringan hubungan horizontal yang didasarkan atas kekerabatan dan ketetanggaan, dan yang kedua membentuk hubungan jaringan sosial vertikal. Terdapat kecenderungan di wilayah penelitian bahwa rumah tangga miskin tidak terisolasi memanfaatkan jaringan keluarga dekat lebih dominan daripada tetangga terdekat, sedangkan rumah tangga miskin yang terisolasi lebih banyak memanfaatkan jasa tetangga terdekat dibandingkan keluarga kerabat yang jauh atau sahabat jauh. Hal yang menarik adalah kecilnya persentase kedua rumah tangga miskin yang memanfaatkan jasa pinjaman resmi baik di BKK (Badan Kredit Kecamatan) maupun KUD (Koperasi Unit Desa). Dalam rumah tangga miskin yang terisolasi, ikatan rumah tangga jauh lebih ketat daripada suatu profil rumah tangga miskin tidak terisolasi.
- b. Melakukan diversifikasi usaha (*off-farm jobs activities*) dan melibatkan segenap potensi atau seluruh anggota keluarga untuk bekerja. Terdapat dua pola alternatif yang utama yang dilakukan oleh nelayan miskin di Kodya Batam yakni diversifikasi usaha internal subsektor perikanan seperti: memancing, menjala, mengkeramba, menyuluh, dan menjaring, dan diversifikasi usaha di luar subsektor perikanan seperti: menjadi pekerja musiman suatu proyek, sebagai buruh pelabuhan bila sandar kapal, mencari kayu di hutan, sebagai penambang boat "pancung", memanfaatkan lahan kosong (tanah negara), dan membuka warung. Melakukan diversifikasi usaha sangat membantu rumah tangga dalam mengatasi kemiskinannya. Mengingat laut di Kodya Batam juga mengalami empat musim (Barat Timur, Utara Selatan), maka jenis dan hasil tangkapan juga dipengaruhi oleh keempat musim tersebut. Keempat musim ini membentuk pula karakteristik jenis usaha menangkap ikan. Pada musim Utara, usaha penangkapan di laut lepas berubah menangkap ikan di pinggir pantai. Para nelayan menyesuaikan keadaan air seperti saat air surut ataupun pasang, siang ataupun malam, sedangkan gambaran pola antar musim dan keadaan musim di *hinterland* Kodya Batam. Penelitian ini menemukan pola musim menentukan pula jenis alat tangkap, mengingat jenis ikan atau biota laut bergerak menurut keadaan musim. Di sinilah keahlian nelayan dalam membaca musim dan kondisi air/ arus.
- c. Melakukan migrasi. Terdapat dua pola migrasi yang dilakukan oleh rumah tangga miskin di pedesaan Kodya Batam, pertama, melakukan

urbanisasi dan kedua bermigrasi ke luar negeri. Apabila alternatif dipilih untuk melakukan urbanisasi, maka Pulau Batam dan Pulau Bintan menjadi lokus utama, sedangkan alternatif perjalanan migrasi dengan tujuan mencari pekerjaan, daerah tujuan utama adalah di Singapura dan Johor. Terdapat dua faktor yang mendorong suatu rumah tangga miskin, khususnya untuk melakukan migrasi; yakni pertama, faktor internal seperti himpitan ekonomi dan adanya perubahan orientasi nilai, sedangkan faktor kedua, yakni: faktor eksternal karena terbatasnya pekerjaan di desa, terbukanya transportasi dan komunikasi ke daerah tujuan, kesediaan keluarga di daerah tujuan menampung, terbukanya alternatif pekerjaan di daerah tujuan. Adapun faktor lokasi yang disenangi oleh para migran yakni: letak kota di dan berdekatan dengan pantai, jangkauan wilayah tidak terlalu jauh, masih dalam kelompok etnik yang sama (Melayu), dan kemungkinan kerja di bidang kelautan (sebagai pelaut/kelasi, penambang dan buruh pelabuhan). Tentang pola migrasi dan alternatif daerah tujuan dan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 19. Jadi, dalam melakukan migrasi atau usaha meninggalkan kampung halaman dalam mencari pekerjaan baru di tempat baru, kaum miskin nelayan selalu menemukan pola yang sama.

- d. Mengadopsi kebudayaan kemiskinan dan adaptasi pola hidup miskin. Jika ditinjau dari perspektif pola hidup sehari-hari, maka kaum miskin memiliki karakteristik spesifik kultur dan kebiasaan yang apabila ditarik benang merah dapat membedakannya dengan profil masyarakat lainnya. Latar belakang yang membentuk perilaku demikian tidak jauh dari kondisi kemiskinan yang dihadapi sehingga bagi kaum miskin masalah kemiskinan adalah sebagai persoalan hidup yang harus diatasi secara mandiri. Mempertahankan pola hidup miskin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kiat mempertahankan hidup kaum miskin. Untuk tetap bertahan, mereka harus sanggup hidup makan seadanya dan kalau perlu segala-galanya mereka makan, berpakaian apa adanya, dan bahkan tinggal di mana saja. Kalaupun mereka memiliki rumah secara tetap, gambaran yang lazim ditemukan adalah kekumuhan bukan sekedar kesederhanaan. Dalam hal permukiman di lingkungan rumah tangga miskin, ditemukan pula kaitan erat antara kekotoran (fisik) dengan kemiskinan, penyakit dengan kemiskinan, keterbelakangan dengan kemiskinan, bahkan sikap "terserah" dan pasrah (*fatalism*) dengan kemiskinan. Banyak rumah tangga miskin memiliki perasaan marginalitas dan karakteristik petani subsistensi. Penelitian di *hinterland* Kodya Batam menunjukkan bahwa kaum miskin termasuk kelompok masyarakat yang memanfaatkan kemurahan alam, dengan berusaha menyesuaikan lingkungannya. Bagi rumah tangga miskin, ikan yang kualitasnya baik biasanya dijual, sedangkan mereka

mengonsumsi jenis ikan yang tidak atau kurang laku di pasaran. Mengubah pola pangan sisi lain dari upaya mengatsia kemiskinan. Berbeda dengan rumah tangga yang lebih mapan, maka rumah tangga miskin mengatur menu makanan disesuaikan dengan ekonomi keluarga, makan apa yang ada pada waktu itu tanpa mampu menjamin apakah menu yang dimakan bergizi atau apakah ada hari esok untuk makan. Mengubah pola pangan sekaligus mengurangi jumlah dan jenis makanan menurut musim dan keadaan ekonomi keluarga merupakan kiat untuk mempertahankan hidup. Apabila mereka mendapat hasil tangkapan lebih, menu makan mereka lebih baik, jika tidak, biasanya strategi mengetatkan ikan pinggang menjadi suatu alternatif. Meskipun tidak ditemukan seorang miskin pun menderita kelaparan sehingga menyebabkan kematian, namun tidak jarang ditemukan, mereka mengalami kurang gizi dan menghidap berbagai jenis penyakit yang menggiring mereka ke pintu kematian karena banyak dari mereka sakit yang tidak mampu diobati dengan layak. Dalam mengobati penyakit, biasanya kaum miskin melakukan usaha pengobatan sendiri. Banyak di antara mereka tidak memanfaatkan Puskesmas atau Puskesmas Pembantu setempat, akan tetapi berobat dengan dukun (bomoh). Hal yang menarik yang mendorong mereka berobat ke dukun bukan semata-mata masalah keyakinan akan sembuh, akan tetapi masalah praktis yakni sistem pembayaran setelah sembuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan pula bahwa kebijaksanaan Pemerintah mengembangkan Pulau Batam sebagai pusat pertumbuhan masih belum memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah *hinterland* karena adanya divergensi dalam faktor spasial, kondisi sosial, kebijaksanaan ekonomi. Kebijaksanaan pembangunan mengembangkan Pulau Batam belum mampu memberikan linkage ekonomi bagi wilayah *hinterland*.

Masyarakat masih banyak yang hidup dalam suasana keterbelakangan, kemiskinan, dan merasakan adanya kesenjangan pembangunan. Pembangunan di satu sisi, keterbelakangan di sisi lain dalam suatu wilayah yang sama. Banyak pula paket yang ditujukan kepada orang miskin terjadi bias target dan mislokasi program. Namun demikian kaum miskin di pedesaan tidak berpangku tangan dalam mengatasi kondisi keterbelakangan, situasi kesenjangan dan problema kemiskinan, mengingat dalam kondisi semiskin apa pun, kaum miskin masih memiliki kiat untuk mempertahankan hidup. Dalam upaya Pemerintah megentaskan masyarakat mis-

kin dari jerat kemiskinan di wilayah *hinterland* Batam belum ditemukan titik temu antara apa yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin di perkampungan nelayan dengan apa yang diprogramkan oleh Pemerintah. Strategi *survival* kaum miskin tidak dijadikan basis untuk merumuskan kebijaksanaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaluddin, Moh. 1987, *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial, Studi Kasus di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah*, Seri Tesis S-2, Pascasarjana IPB, Bogor.
- Balough, Thomas. 1974, *The Economics Of Poverty*, The International Arts And Science Press Inc., White Plains, New York.
- Berger, Peter, L. 1976, *Pyramids of Sacrifice, Political Ethics And Social Change*, Anchon Press, New York.
- Caplovitz, David, 1963, *The poor Pay More*. The Free Press, New York.
- Chambers, Robert, 1983. *Rural Development. Putting The Last First*, World Bank Staffs-Working Paper, New York.
- Emerson, Donald, K. 1979, *Bagaimana Menaikkan Taraf Hidup Lapisan Masyarakat Termiskin di Desa Pantai?*, PPW-Jawa Tengah, Semarang.
- Effendi, Sofyan, 1986, *Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru*, Prisma No.12, LP3ES, Jakarta
- Edgren, D. dan Muqtada, M, 1987, *Rural Employment Creation In Asia and Pasific. An Overview*, Dalam *Rural employment Creation In Asia and Pasific Papers and Proceedings of The Asian Development Bank*, Manilla.
- Firth, Raymond. 1966, *Malay Fishermen, Their Peasant Economy*, Routhledge and Reagan Paul Ltd, London.
- Fishlow, Albert, et al. 1980, *Rich And Poor Nations In The World Economy*, McGraw Hill Books Company, New York.
- Friedman, J. and Alonso, (ed.), 1964. *Regional Development And Planning*, A Reader, Cambridge.
- Haq, Mahbub, U. 1976, *The Poverty Curtain; Choices For The Thirld World*, Colombia University Press, Colombia.
- Hagul, Peter (ed.), 1982, *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Johari, Mohd, Y. 1984, *Social Cultural Division Of Development Planning*, Institute of Development Studies, Sabah, Kinabalu.
- Korten, David, C. dan Clauss, Rudi, 1984, *People Centred Development; Contribution Toward Theory And Planning Frame works*, Kumarian Press.
- Katz, S.M, 1965, *A Guide To Modernizing of Administration for National Development*, GSPIA, University of Pitsburg.
- Leftwich, Richard, H, et al. 1984, *Economics Of Social Issues*, Business Publication, Texas.

- Lutfi, Muchtar dkk., 1985, *Pembinaan Sumber Daya Manusia Perairan di Daerah Riau* (Laporan Penelitian), UNRI-Bappeda Tk.I Riau, Pekanbaru.
- Lipton, Michael. 1980, *Why Poor People Stay Poor? Urban Bias In World Development*, Harvard University Press, Massachussetts.
- Mubiyarto dkk., 1984, *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Anthropologi di Dua Desa Pantai*, Rajawali Press, Jakarta.
- — — 1988, *Pembangunan Desa Pantai di Propinsi Dati I Riau* (Laporan Akhir Penelitian) Kerjasama P3PK-UGM, Bappeda Tk.I Riau, Pekanbaru.
- Moore, M.P, dan Wickremesinghe, G, 1980. *Agriculture And Society In The Lower Country (Srilangka)*, Agrarian Research And Training Institute, Colombo.
- Malassis, L. 1975, *Agriculture And The Development Process*, The Unisco Press, Paris.
- Nazwar, Evyet, 1990, *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Pada Nelayan Tradisional*, Tesis S-2, Studi Ekonomi Pertanian, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Rondinelli, Dennis, A. 1985, *Applied Methods of Regional Analyses. The Spartial Dimensions Of Developing Policies*, Boulder Westview Press, London.
- Seers, Dudley, 1963. *The Meaning Of Development*, A Paper presented to 11th World Conference Of Sociology For International Development, New Delhi.
- Sayogyo dkk., 1994, (Penyunting), *Kemiskinan dan Pembangunan di Propinsi Dati I NTT*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- — — 1978, *Lapisan Masyarakat Yang Paling Lemah di Pedesaan Jawa*, Prisma, Jakarta.
- — — dan Sayogyo, Pudjijati, 1991, *Sosiologi Pedesaan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- White, Bryant dan Sinaga, R.S. 1978, *Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa Barat Dalam Hubungannya dengan Kemiskinan Struktural*. Dalam Selo Sumardjan, dkk. (Eds.) *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*, Sngkala Pulsar, Jakarta.